ILMU SOSIAL TRANSFORMATIF

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

Oleh:
Prof. Drs. Purwo Santoso, M.A, Ph.D.

Diucapkan di depan Rapat Terbuka
Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada
pada tanggal 19 April 2011 di Yogyakarta

BHINNEKA TUNGGAL IKA

ILMU SOSIAL TRANSFORMATIF

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
pada tanggal 19 April 2011
di Yogyakarta

Oleh:
Prof. Drs. Purwo Santoso, MA, Ph.D

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang Terhormat;
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat,
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Mejelis Guru Besar,
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik,
Rektor, Wakil Rektor senior, dan Wakil Rektor,
Para Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Lembaga di Lingkup Universitas,
Segenap Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada,
serta tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan

Pertama-tama perkenankanlah saya dengan segenap kerendahan hati mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, pagi ini saya dapat menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Pidato yang hendak saya sampaikan ini sebetulnya remeh-temeh, namun terlalu riskan untuk diabaikan begitu saja di tengah tuntutan jaman yang semakin maju berubah. Meskipun demikian, lingkup pembahasan pidato ini hanya terbatas pada bidang ilmu yang saya tekuni, yaitu *ilmu sosial*.

Kita tahu bahwa universitas-universitas di Indonesia, termasuk Universitas Gadjah Mada yang sangat saya banggakan ini, hendak *go international* dalam skema *World Class Research University* (*WCRU*). Obsesi ini jangan sampai melupakan esensi universitas itu sendiri, yakni *"untuk pengembangan ilmu"*. Apalagi ada sinyalemen bahwa ilmu sosial di Indonesia sedang mengalami krisis jati diri. Oleh sebab itu, agar tidak terbuai dengan label *world class*, para ilmuwan sosial harus memikirkan ilmu yang betul-betul berkarakter, yakni ilmu sosial yang transformatif. Atas dasar itulah, pidato ini berjudul:

ILMU SOSIAL TRANSFORMATIF

Hadirin yang cendikia;

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ilmu pengetahuan adalah alat kekuasaan. Pengembangan ilmu dalam skala global tentu saja berlangsung dalam peta kekuatan dan kekuasaan global juga. Dari pendapat sederhana ini, cukuplah alasan untuk mengatakan bahwa jerih payah bersama dalam pengembangan ilmu, termasuk ilmu-ilmu sosial, tidak mungkin bersifat netral.

Sungguh pun demikian, kegiatan pengembangan ilmu, termasuk memapar diri di kancah internasional, biasanya dilakukan dengan asumsi adanya ilmu yang netral, termasuk netral dari kepentingan politik dan ekonomi global. Teori-teori yang dipakai, termasuk teori sosial, diasumsikan bersifat netral. Penjelasannya pun *"apa adanya"*, dan bukan sebaliknya, menunjukkan *"ada apa-apanya"*.

Dalam cara pandang yang populer, teori-teori sosial diperlakukan sebagai kebenaran dan fakta universal. Penerapannya ke dalam kehidupan nyata dipahami sebagai aktivitas keilmuan belaka. Padahal, penerapan teori ke dalam kehidupan masyarakat adalah suatu pertaruhan nasib. Penerapan paket-paket teori impor, apalagi yang belum sempat dikaji-sesuaikan dengan kondisi negeri ini acapkali memunculkan sejumlah persoalan baru.

Ini memang cara pandang klasik-romantis. Ada banyak ilmuwan yang menepisnya dengan mengatakan: "*ilmu seharusnya tidak dibatasi oleh nasionalisme"*. Terhadap tepisan ini saya hanya perlu mengingatkan bahwa ilmu sosial di negeri ini adalah ilmu tentang kita. Teori-teori yang dibangun orang asing tentang kebersamaan kita, merupakan ketidaksadaran kita akan arti penting masa depan kita. Pengetahuan orang asing tentang kita, pada dasarnya adalah kesempatan lebih pada mereka untuk menguasai kita. Penguasaan akan ketidaksadaran kita, adalah pintu penjajahan ataupun dominasi. Apa yang terjadi kalau kendali pengembangan ilmu tidak ada pada diri kita? Ketidaksadaran tentang keseharian kita yang secara diam-diam telah mereka teorisasikan, memungkinkan mereka mengendalikan diri kita melalui ilmu pengetahuan.

Hadirin yang budiman;

Ada yang mengatakan di negeri ini ilmu mengalami *kemandegan*, dan ada juga yang menilainya terlilit krisis.[1)] Gejalanya antara lain tampak pada kontribusi para ilmuwan sosial dalam pengembangan ilmu, baik di tataran teoritik maupun metodologis, belum bisa dibanggakan.[2)] Ilmuwan sosial di negeri ini masih terkesan terombang-ambing menentukan aliran atau mazhab yang ditawarkan para teoritikus asing. Selain itu, ketika berdebat tentang politik dan pemerintahan di Indonesia, rujukannya adalah *Indonesianis non-Indonesia*.

Yang jelas, Indonesia telah lama dijadikan sebagai lokasi penelitian para ilmuwan sosial mancanegara. Dalam kurun waktu yang panjang itu, kita hanya membiarkannya terus terjadi. Dari penelitian-penelitian mereka telah lahir teori-teori besar. Ada teori *dual society* yang dirumuskan Booke,[3)] teori politik aliran yang ditawarkan Herbert Feith dan Lance Castle,[4)] ada teori tentang kekuasaan dalam masyarakat Jawa yang ditawarkan oleh Benedict Anderson,[5)] dan entah apa lagi. Kita tidak pernah menandinginya.

Sebagai lembaga pengembangan ilmu, universitas memegang tanggung jawab moral untuk menjamin komunitas keilmuannya memiliki kapasitas tinggi dalam menyerap dan mengembangkan ilmu. Yang diperlukan bukan hanya pembelajaran pada diri masing-masing ilmuwan, namun juga komunitas ilmuwan itu sendiri. Pada tingkat inilah universitas di Indonesia sepertinya masih bermasalah. Boleh jadi, komunitas ilmuwan sosial di negeri ini mengalami sindrom *collective learning difficulty* (kesulitan belajar dalam kebersamaan), kalau bukan *collective learning dissability* (ketidakmampuan belajar dalam kebersamaan). Universitas bisa saja menghasilkan sarjana, master, tenaga-tenaga profesional dan doktor yang baik, namun belum tentu memiliki kecanggihan dalam hal pembelajaran demi menghasilkan temuan-temuan baru.

Contoh sederhana dari *collective learning dissability* ini adalah ironi ilmuwan politik. Dalam menggeluti ilmu politik, mereka kehilangan visi politik, yaitu; *tidak mengitung dampak politik dari akumulasi ilmu itu sendiri*. Oleh karenanya, jika pengembangan ilmu tidak disertai dengan kejelasan visi "politik", ilmuwan sebetulnya

hanya partisipan dari suatu sistem informasi.[6)] Studi Carlile tentang sistem informasi yang dilakukan dalam hubungan antar bangsa mengidentifikasi adanya tiga derajat *learning organization*; yakni (1) sintaktis, (2) semantik dan (3) transformatif.[7)] Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam derajat *sintaktis*, perhatian utama adalah ketepatan menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran. Mereka hanya mentransfer ilmu dan memproses informasi secara apa adanya. Komunitas yang terlibat tidak hirau persoalan metodologis. Belajar pada dasarnya adalah hanya untuk *meniru dan meniru*. Obsesi mereka adalah penguasaan ontologis dalam bidang ilmunya.

Tataran pembelajaran *semantik* lebih berani menafsir atau memahami makna tersirat di balik fenomena tertentu. Proses menafsir memang beresiko salah, namun juga berpotensi menghasilkan pengetahuan baru berkat kepiawaian metodologi keilmuan.

Sedangkan pembelajaran *transformatif* ditandai oleh kemampuan mengambil manfaat berdasarkan kebutuhan yang jelas dan pada saat yang sama paham, fasih dalam menghayati dan menerapkan metodologi yang tersedia. Berangkat dari kesadaran konteks dan pemahaman akan berbagai peluang yang terbuka, mereka terus menerus terlibat dalam upaya memajukan ilmu pengetahuan.

Para kolega, ilmuwan sosial yang saya hormati;

Mari kita bertanya pada diri sendiri, sambil melakukan evaluasi diri dalam komunitas masing-masing; masuk kategori manakah model pembelajaran yang kita selenggarakan? Bilamana kita tampil dalam peringkat tinggi sebagai *WCRU*, namun model pembelajarannya masih berwatak *sintaktik*, maka peringkat tinggi tersebut sebetulnya sia-sia. Peranan kita, boleh dibilang, sekedar meniru-niru apa yang dilakukan oleh ilmuwan di tempat lain.

Keterlibatan dalam *WCRU* mensyaratkan dedikasi untuk tetap berkiprah dalam pengembangan ilmu, bukan pengembangan peringkat. Jika keberhasilan naik peringkat ini tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan mengembangkan ilmu, maka keterlibatan kita sebetulnya hanya di pinggiran saja, dan mudah terombang-ambing oleh perubahan global.

Hadirin yang saya muliakan;

Ada kecenderungan dari universitas di negara-negara pascakolonial, tidak terkecuali universitas di negeri ini, menjadikan universitas di negara-negara maju sebagai rujukan pengembangan ilmu. Relasi tersebut dapat menimbulkan efek ketergantungan terhadap perguruan tinggi di negara industri maju, baik secara alamiah maupun *by design.* Gejala tersebut terlihat dari sosok universitas yang belakangan ini telah berubah menjadi pelaku industri pendidikan. Dan dalam pergeseran ini, tidak ada rumusan tentang arah politik pengembangan ilmu, selain memastikan menjadi mata rantai industri itu sendiri. Kita juga tidak punya formulasi yang jelas ke negeri mana para dosen ilmu-ilmu sosial harus belajar, karena tidak ada spesifikasi ilmu yang hendak dikembangkan, dan masalah apa yang harus diatasi. Yang jelas, keputusan itu diambil alih oleh mereka yang menawarkan beasiswa belajar di luar negeri. Mereka justru yang ingin mendatangkan kita.

Pelajaran yang bisa dipetik dari pemaparan tersebut adalah bahwa kita perlu politik pengembangan ilmu. Hal ini tidak bisa digantikan oleh pengembangan manajemen dan kelembagaan. Tantangan pengembangan politik keilmuan ini sebetulnya merupakan bagian tak terpisahkan dari keharusan untuk mengatasi persoalan bangsanya. Namun sayangnya, pengembangan ilmu justru menambah target-target baru kalangan ilmuwan itu sendiri.[8)] Padahal kegagalan teori sosial di negeri ini masih terasa.

Hadirin yang terhormat;

Kalau komitmen kita adalah menjalankan amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka menampilkan universitas sebagai *WCRU* haruslah ditopang kapasitas menjadi sumber pengembangan ilmu. *WCRU* harus dipastikan tidak berfungsi sebagai instrumen konglomerasi pengetahuan yang justru memposisikan Indonesia semakin ketagihan dan tergantung.

Citra universitas kita di arena internasional memang harus semakin menonjol. Jangan sampai kita yang dituntut menyesuaikan diri terhadap standar yang berlaku di negara lain, karena kita tidak sanggup memperjuangkan standar alternatifnya.

Telaah kritis tentang *WCRU* tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersalahkan siapa-siapa, melainkan sekedar mengajak untuk melakukan refleksi diri. Jangan sampai kita terbuai oleh sistem peringkat yang diberlakukan dalam *WCRU,* sampai-sampai melupakan hal yang lebih krusial, yaitu menawarkan alternatif pengembangan ilmu. Dan yang lebih utama lagi, universitas-universitas di negeri ini idealnya memiliki kontrol terhadap ilmu yang akan dikembangkan.

Ijinkan saya menggunakan contoh dalam pengembangan teori politik, khususnya *teori demokrasi*. Kita belum lupa bahwa konsep musyawarah begitu gencar di ditonjolkan pemerintah, dan para ilmuwan politik begitu genjar juga mencercanya. Setelah Orde Baru berlalu, kita dikejutkan oleh demokrasi permusyawaratan (*deliberative democracy*) yang dikembangkan oleh ilmuwan mancanegara. Ironis bukan? Kita harus belajar sesuatu kepada orang lain tentang hal yang pernah dan mungkin masih menjadi watak budaya kita.

Sebab itu, ilmuwan sosial perlu menentukan alat ukur sendiri, untuk menunjukkan kemajuan kita dalam menggarap persoalan yang kita lebih tahu, kita lebih mampu. Ukuran itu harusnya bersifat substantif, misalnya keberhasilan mengembangkan mahzab baru dalam bidang kajian tertentu. Paling tidak, ukurannya adalah tidak *kecolongan*.

Hadirin yang saya muliakan;

Usulan untuk merumuskan politik keilmuan dalam rangka *go international* tidaklah mengada-ada. Hal itu juga dilakukan oleh negara lain. Teori ketergantungan yang dikembangkan oleh para ilmuwan di negara-negara Amerika Latin misalnya, menyediakan pijakan bagi perpolitikan di negeri itu untuk memutus ketergantungan mereka terhadap negara-negara industri maju.[9)] Model pembelajaran yang mereka kembangkan adalah model yang *transformatif*.

Hal yang setara dilakukan oleh para ilmuwan di negara Asia Timur. Mereka dipercaya menjadi arsitek industrialisasi, dan dengan kepercayaan tersebut mereka mentransformasikan penggunaan teori pasar yang diunggulkan negara-negara industri maju. Dengan penguasaan teori pasar, mereka bukannya meminggirkan negara, melainkan justru memperkuat negara. Formula ini kemudian dilabeli sebagai teori *developmental state*. Berkat upaya merekalah kawasan Asia Timur mengemuka sebagai pusat kekuatan baru perkembangan ekonomi dunia.

Komunitas ilmuwan sosial di kedua kawasan, ternyata merumuskan politik pengetahuan untuk negeri mereka. Baik penerapan teori ketergantungan maupun teori *developmental state*, keduanya digerakkan oleh semangat nasionalisme.

Para ilmuwan di masa Orde Baru pun telah mencoba untuk bekerja dalam bingkai *developmental state*. Namun, nasionalisme keilmuan ini tidak tereproduksi secara seksama. Lebih lagi, prestasi Indonesia tidak segemilang negara-negara di Asia Timur. *Developmental state* pada masa Orde Baru terpeleset menjadi *predatory state*. Sambil mempidatokan pembangun, diam-diam banyak aktor yang menjadi; *pemangsa kesejahteraan bangsanya sendiri*.

Hadirin yang saya muliakan;

Ilmu sosial yang dimaksud di sini mencakup berbagai disiplin, termasuk Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Eknomi, Antropologi, Sejarah, Ilmu Hukum dan seterusnya. Istilah *transformatif* di sini dipakai dalam pengertian yang longgar, sekedar untuk menandai cara kerja ilmuwan yang tidak hanya berjuang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya sendiri, namun peduli. Dan pada gilirannya berdedikasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakatnya. Muara dari kegiatan pengembangan ilmu yang ditekuni bukan hanya stok pengetahuan yang lebih banyak dan lebih baik, melainkan juga kapasitas mengatasi masalah-masalah sosial.

Sungguhpun demikian, ilmu sosial transformatif bukanlah ilmu tentang ketrampilan (vokasi). Watak transformatif ilmu sosial bukan ditentukan oleh ketrampilan teknis, melainkan ditentukan oleh

komitmennya untuk mewujudkan realitas baru sesuai dengan yang diteorikannya. Ketika membahas *good governance* misalnya, kepeduliannya bukan hanya pada ukuran dan ciri-ciri *good governance*, melainkan menghasilkan perilaku bersama yang memenuhi ukuran dan ciri-ciri yang dimaksud. Realita baru ini merupakan ekspresi dari komitmen etik yang direproduksi melalui proses pendidikan yang dikelola oleh universitas.

Pengembangan ilmu sosial transformatif mensyaratkan kepiawaian dalam tiga dimensi filsafat ilmu, yakni: *ontologi*, *epistemologi* dan *aksiologi*. Pencanggihan di tiga dimensi ini perlu dilakukan dalam kebulatan. Artinya sisi epistemologis dan sisi aksiologis harus mendapatkan perhatian yang serius. Watak *transformatif* perlu didasari dengan kejelasan pilihan epistemologis. Oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu sosial transformatif, keberadaan metode keilmuan yang mengedepankan obyektivitas tidak harus ditolak, namun harus disadari kenaifannya. Kemudian dicarikan cara untuk mengkompensasi keperluannya untuk transformatif. Watak transformatif juga ditentukan oleh pilihan aksilogis-nya. Ilmu sosial dikembangkan bukan sekedar akumulasi teori, melainkan juga untuk memperbaiki relasi sosial yang terjalin. Dan akhirnya, menghasilkan realitas sosial yang di nilai jauh lebih baik.

Studi dalam skala terbatas yang saya lakukan bersama kolega di Jurusan Politik dan Pemerintahan, menunjukkan bahwa kemandegan pengembangan ilmu dari sisi ontologis tidak diimbangi dengan kepiawaian epistemologis dan aksiologis. Sehingga ilmu yang dipelajari sekedar untuk tahu atau tahu lebih banyak. Sangat sedikit semangat advokasi yang direproduksi dari kegiatan keilmuan yang dipelajari. Kepincangan dalam penguasaan dan penerapan tiga dimensi filsafat ilmu ini, ternyata sejalan dengan tiga tipe pembelajaran kolektif yang telah dirumuskan oleh Carlile sebelumnya.

Kebuntuan pengembangan ilmu adalah ketika obsesi ontologis dikejar tanpa penguasaan epistimologis dan aksiologis. Ilmu dikembangkan sekedar; *mau tahu apa yang diketahui orang lain*. Model pembelajaran komunitas seperti ini, wataknya adalah sintaktis, karena ilmuwan yang bersangkutan tidak sempat memahami duduk persoalan yang dipelajari. Ketika menengok kembali model pembelajaran yang berlangsung di masa lalu, kita sering menemukan

gejala semacam itu. Sebagai contoh, ketika mengajarkan matakuliah tentang sistem, kami tidak sempat mempersoalkan mengapa konsep sistem ditawarkan, dan pengajarannya lebih pada pertanyaan: *apakah sistem itu?* Reproduksi kemampuan menghasilkan pengetahuan akan lebih terlihat sekiranya yang dilakukan adalah mengajari berpikir sistem dan memperjuangkan sistem. Pembelajaran akan lebih hebat lagi sekiranya keberhasilan pembelajaran diukur dari kemampuan menerapkan sistem dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Penguasaan epistimologis memungkinkan ilmuwan memahami berbagai persoalan, sehingga memungkinkan dirinya mampu menarik makna. Perluasan kompetensi dari pemahaman ontologis dengan memperkuat basis epistemologis, memungkinkan ilmuwan mengembangkan pembelajaran yang bertaraf semantik. Ijinkan saya mengajak kembali pada contoh sebelumnya: *pembelajaran tentang sistem*. Targetnya bukan hanya bagaimana mereproduksi cara berpikir sistemik. Pengembangan ilmu transformatif berlangsung manakala pertanyaan ontologis diajukan karena pertanyaan-pertanyaan aksiologis. Kalaulah belajar sistem dan cara berpikir sistemik, pembelajaran itu didorong oleh keinginan membentuk sistem dalam situasi tertentu. Kuatnya dorongan untuk menjawab pemasalahan yang menggejala, membutuhkan kerangka epistemologis untuk menjelaskannya.

Hadirin yang budiman;

Politik pengembangan ilmu yang kita dambakan, sebetulnya sudah tersirat dari keharusan untuk mengkaitkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai suatu kebulatan. Semangat ini perlu ada pada setiap ilmuwan. Pengelolaan universitas, sebagaimana tampak belakangan ini, harus didasari oleh keperluan untuk memastikan masing-masing Dharma Perguruan Tinggi tersebut bersifat saling menunjang. Istilah transformatif, yang dikemukakan dalam isi pidato ini, sebetulnya hanyalah penegasan bahwa muara dari aktualisasi kegiatan ilmu, baik pendidikan maupun penelitian, adalah *pengabdian pada masyarakat*. Pengabdian ini bukanlah beban tambahan yang harus dipilih, tapi justru menjadi basis pijakan.

Dalam interaksi dengan mitra kerja dari luar negeri, tidaklah mudah menuntut atau mengajak mereka ambil bagian dalam menunaikan misi pengabdian pada masyarakat. Sebagai contoh, kami menjalin kerja sama internasional dengan sejumlah Indonesianis untuk meneliti proses demokratisasi. Karena mereka bukan orang Indonesia, mereka tidak punya komitmen untuk mendorong proses demokratisasi melalui riset tersebut. Mereka sangat antusias untuk menghasilkan laporan yang baik dan menerbitkannya, namun tidak merasa perlu untuk memfasilitasi penggalangan jejaring aktivis pro-demokrasi.

Hadirin yang terhormat;

Apa yang bisa dan perlu dilakukan agar *WCRU* ditopang oleh politik keilmuan yang kokoh? Bagaimana memastikan ilmuwannya sanggup keluar dari krisis keilmuan dan memiliki kontribusi bagi penanganan masalah-masalah sosial di negeri ini?

Prasyarat utama agar bisa berkembang adalah memiliki keberanian untuk mengevaluasi diri sendiri, dan mengambil langkah yang tepat berdasarkan evaluasi itu sendiri. Pertanyaannya, pada level manakah evaluasi itu harus dilakukan? Seberapa jauh unit-unit ini menata diri mengembangkan ilmu yang digelutinya?

Materi evaluasi bukan hanya seberapa bagus mereka mengelola proses pembelajaran, melainkan juga memerankan diri sebagai unit pengembangan ilmu. Kalau perlu, universitas menargetkan lahir dan berkembangnya mahzab keilmuan sendiri, sehingga komunitasnya dikenal dari kekhasan gaya pemikirannya, bukan karena gelar atau jabatan. Jika usulan ini disetujui, maka ilmuwan sosial perlu memiliki ketegasan aksiologis, sebab ilmu sosial dikembangkan bukan untuk di timbun melainkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

Di Universitas Gadjah Mada disepakati formula pembagian peran. Formula ini dikenal dengan istilah SADA, singkatan dari Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik. Dengan adanya desentralisasi akademik ini, maka pelaku dan tanggung jawab pengembangan ilmu ada pada unit-unit kecil, setidaknya Jurusan dengan Program-program Studi dan pusat-pusat penelitian. Sehubungan dengan agenda pengembangan WCRU ini, sungguh amat disayangkan kalau desentralisasi akademik yang telah diberlakukan,

tidak bermuara pada aktualisasi diri para ilmuwannya. Skema desentralisasi akademik akan menjadi hal yang sia-sia, bilamana tidak bermuara pada kebangkitan ilmuwan dan ilmu sosial di Indonesia.

Tidak optimalnya aktualisasi otoritas akademik yang telah didesentralisasikan, dapat menyebabkan penampilan *WCRU* pincang. Dari segi peringkat bagus, namun memprihatinkan dari segi kontribusinya. Oleh karena itu, para ilmuwan sosial dituntut untuk mengevaluasi dirinya sendiri.

Sebetulnya, skema evaluasi sudah ada dan sudah dijalankan. Pengukuran terhadap kinerja unit-unit akademik ini memang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan skema EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri). Di samping itu, ada juga skema akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN). Hanya saja, yang diungkapkan skema ini bukanlah kinerja dalam pengembangan ilmu, melainkan kinerja dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Kalaulah kinerja suatu program studi diberi nilai ‘A’, tidak ada jaminan bahwa dalam pengembangan ilmu, program studi ini berkualitas ‘A’.

Hadirin yang bijaksana;

Ketika *go international*, ada prasyarat yang kita berlakukan pada diri sendiri, yaitu: *sanggup berperan sebagai produsen ilmu*. Dengan demikian, keterlibatan kita di kancah internasional, tidak hanya “pengimpor”, namun juga “pengekspor” pengetahuan. Kita perlu mewaspadai godaan untuk mudah puas diri. Mengapa? Selama ini terjadi hubungan yang tidak sama dan tidak seimbang antara negara-negara industri maju dengan negara-negara berkembang. Tersedianya teknologi informasi dan berbagai fasilitas lain, telah memudahkan ilmuwan sosial mengakses berbagai kajian yang ada di muka bumi ini. Tetapi, ilmuwan sosial di negeri ini hanyalah konsumen bertaraf global, bukan produsen yang sanggup memasarkan produk-produknya di arena internasional. Pertanyaannya, bagaimana keluar dari zona nyaman sebagai konsumen, dan secara lambat tapi pasti hadir sebagai produsen dan “eksportir” ilmu?

Dalam kultur akademik yang berlaku, ilmuwan memang perlu merujuk atau menyebut sumber pengetahuan dengan jelas dan jujur. Hanya saja, kaidah ini tergelincir menjadi ketidakberanian berargumentasi. Hal ini saya alami ketika membimbing calon sarjana, calon master dan calon doktor. Mahasiswa kesulitan membangun proposisi argumentatif dalam tugas akhir mandiri yang mereka kerjakan. Tampaknya ini terkait kultur pembelajaran ilmu sosial yang dalam banyak kasus, didasari semangat mentransfer ilmu, bukan mentransformasikan pengetahuan. Sumbernya jelas: *ketidakpiawaian metodologis*.

Oleh sebab itu, program-program studi yang mengampu ilmu sosial perlu menjamin penerapan berbagai pilihan mahzab keilmuan. Dengan tawaran berbagai pilihan mahzab dan pendisiplinan para ilmuwan, maka muncullah permasalahan-permasalah baru yang mengundang perdebatan, dan adu piawai menggunakan metodologi keilmuan masing-masing. Dengan cara itu pula, muncul berbagai tawaran teori yang pada gilirannya mengundang perdebatan dan pemahaman serta solusi baru.

Untuk mencapai situasi dimana kontroversi ilmiah justru menghasilkan temuan-temuan baru, para ilmuwan yang bersangkutan dituntut untuk memiliki kematangan metodologis. Untuk itu, perlu dipertimbangkan pentingnya *support system* dalam pengembangan kapasitas metodologis. Kita bisa belajar dari *London School of Economics and Political Science* yang mendirikan *Methodology Institute*. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengawal kompetensi metodologi keilmuan dan metode penelitian civitas akademika-nya. Setidaknya semua kandidat doktor harus belajar di lembaga ini, meskipun tidak harus mengumpulkan SKS (satuan kredit semester).

Hadirin yang budiman;

Tanggung jawab utama pengembangan ilmu melekat dalam diri para ilmuwan, bukan pada pimpinan universitas ataupun pimpinan fakultas. Ilmu dapat berkembang manakala ada kegelisahan di kalangan ilmuwan itu sendiri. Dan dijabarkan dalam langkah-langkah konkrit yang pada gilirannya terakumulasi menjadi agenda-agenda

kolektif. Upaya untuk membangkitkan kegelisahan ini sudah berlangsung, hanya saja belum terlihat sebagai geliat kolektif yang mengobsesi komunitas keilmuan di dalamnya. Untuk itu diperlukan setidaknya: (1) pengrajin jejaring ilmuwan atau *social crafting*; (2) mobilisasi kegelisahan; (3) konversi kegelisahan menjadi karya-karya dan amalan ilmiah, serta; (4) reproduksi tapak akademik menjadi kultur akademik. Oleh karenanya, yang perlu dipertanyakan bukan hanya agenda-agenda riset unggulan universitas ini, melainkan juga seperti apakah corak agenda tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja terkait dengan identitas dan jati diri universitas ini.

Sekali lagi, ketrampilan *social crafting* sangat diperlukan untuk menggalang agenda berbasis kegelisahan kolektif dalam komunitas keilmuan yang ada. Tokoh-tokoh kunci dalam komunitas yang ada dituntut untuk mengoptimalkan kepemimpinannya demi menghasilkan karya-karya yang menjawab tantangan yang telah dirumuskan. Lebih dari itu, perlu inovasi untuk memungkinkan produk-produk keilmuannya terpapar kehadapan publik.

Ijinkan saya mengambil contoh yang saya tahu dari dekat, yakni inisiatif komunitas Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas ini. Menyadari bahwa kelembagaan yang sudah ada tidak mewadahi aktivitas-aktivitas yang dikembangkan, maka Jurusan ini menginisiasi unit baru di luar standar kelembagaan universitas. Unit baru ini mulai memperkenalkan diri dengan nama PolGov (*Research Centre on Politics and Government*). Jurusan ini bermaksud untuk mengaktualisasikan Tri Dharma Pendidikan Tinggi dalam komunitasnya. Idenya bukan untuk menjadikan komunitas ini eksklusif, melainkan untuk menjaga agar Tri Dharma Perguruan Tinggi bisa dikelola secara terpadu. Dengan inovasinya, komunitas ini mencoba untuk mencerdaskan dirinya.

Dengan inovasi ini, komunitas keilmuan di dalamnya bermaksud mengembangkan pembelajaran berbasis riset yang hasilnya memperkuat pembelajaran. Untuk memudahkan komunitas ini melepas karya-karyanya ke publik, kegiatan riset dan advokasi di tambah lagi dengan unit yang menjalankan aktivitas publikasi. Dalam konteks ini, *social crafting* yang berlangsung, bermuara pada pengembangan kapasitas kelembagaan, dan pada gilirannya memfasilitasi pengembangan ilmu melalui karya-karyanya. Dengan

karya-karya yang ada, komunitas ini mencoba untuk *go international*. Salah satu agenda yang diusung adalah merumuskan demokrasi dan desentralisasi yang mensejahterakan. Dengan bingkai agenda tersebut, komunitas ini ikut berkontribusi dalam mewarnai perdebatan tentang demokrasi dan desentralisasi yang mensejahterakan, baik di forum nasional maupun internasional.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam kesempatan ini, saya hanya mengingatkan bahwa ada asimetrisme-*cara pandang yang tidak sama*-dalam pengembangan ilmu, khususnya ilmu sosial. Kealphaan dalam menghayati asimetrisme ketika hendak *go international,* bisa berakibat fatal bagi Indonesia pada umumnya, dan bagi ilmuwan sosial pada khususnya. Sebelum terlambat, komunitas ilmuwan sosial perlu melakukan reorientasi dan pembudayaan hal-hal yang secara filosofis telah digariskan. Lebih dari itu, komunitas keilmuan perlu merumuskan dan menyepakati suatu garis politik yang jelas, garis politik keilmuan untuk Indonesia. Kesepakatan pada tataran operasionalnya tidak terlalu sulit untuk diraih. Sebab, acuan-acuan normatif yang kita miliki, seperti Tri Dharma Perguruan Tinggi, sudah cukup jelas memberi acuan. Yang diperlukan adalah imajinasi kreatif dalam menafsirkannya.

Untuk *go internasional*, mau tidak mau, kita harus berangkat dari kondisi dan kepentingan nasional. Belajar dari pengalaman negara-negara Asia Timur, keberhasilan mereka berjaya justru dengan mempertebal nasionalisme-nya. Nasionalisme dalam politik keilmuan universitas adalah pengabdian pada masyarakat. Artinya, *WCRU* yang nasionalistik adalah yang justru membalik pengabdian pada masyarakat; bukan sebagai beban, melainkan pijakan untuk *go international*. Sejalan dengan hal itu, *go international* tidak harus meninggalkan “rumah” Indonesia.

Ilmu sosial transformatif menuntut kerja keras ilmuwan sosial di dua titik ekstrim. Satu sisi mereka dituntut untuk mempertebal penghayatan tentang kaidah fisolofi keilmuan. Namun di sisi lain, mereka dituntut ambil bagian dalam mewujudkan penghayatan filosofis tersebut ke dalam proses *social crafting*.

Meskipun tanggung jawab pengembangan ilmu sosial transformatif ada pada komunitas keilmuan, namun bukan berarti jajaran pengelola universitas lepas tangan. Dalam belitan krisis ilmu sosial ini, pengkondisian dari sisi manajemen sangat diperlukan. Sayap keilmuan dan sayap pengelolaan haruslah mengepak bersama agar kita bisa berjaya sebagai *World Class Research University*.

Semoga Allah meridhoi daya upaya ini, semoga ilmu yang dikembangkan ilmuwan sosial bukan hanya menghasilkan kemaslahatan umat manusia, namun juga meridhoi ikhtiar untuk mewujudkannya dari Indonesia. Amien!

Hadirin yang mulia,

Sebelum mengakhiri pidato ini, ijinkanlah saya sekali lagi mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Dengan perkenan-Nya-lah apa-apa yang pada awalnya tidak mungkin, sebatas mimpi, kini bisa terealisasi. Kemudian, saya juga menyadari sepenuhnya bahwa anugerah Guru Besar ini jelas bukanlah pencapaian personal tanpa keterlibatan multi aktor, baik secara langsung ataupun sebaliknya. Namun karena keterbatasan ruang dan waktu, mohon maaf hanya sebagian saja yang secara eksplisit dapat saya sebutkan, sementara sebagian besar yang lain saya sebutkan di dalam *end-note* naskah.

Secara khusus, saya ingin menghaturkan rasa hormat dan terimakasih kepada Pak Mashuri Maschab, dua sosok pendidik: (alm) Pak Koesnadi Hardjo Soemantri dan Pak Josef Riwu Kaho, yang telah memberi tauladan perihal dedikasi, integritas, profesionalitas, maupun ketulusan dalam menjalani profesi. Merekalah yang turut meneguhkan komitmen saya untuk berada di jalur keilmuan. Selanjutnya adalah keluarga besar baik alumni, mahasiswa, pengawai, maupun seluruh kolega di JPP FISIPOL UGM.[10)] Ucapan yang sama, saya sampaikan kepada para senior dan rekan-rekan di Jurusan Hubungan Internasional, Komunikasi, Administrasi Negara, Sosiologi, Sosiatri, dan rekan-rekan karyawan di lingkup FISIPOL UGM. Khusus untuk mbak Tuti Palupi dan kawan-kawan di Bagian Kepegawaian: terima kasih banget! Tanpa kerja kerasnya, saya tidak akan mungkin berdiri di atas podium ini.

Dari lubuk hati terdalam, saya juga ingin menyampaikan terimakasih berikutnya kepada Guru-Guru hebat saya sejak belajar di SDN 3 Sekuro Jepara, SMP Negeri 1 Jepara, SMA Negeri 1 Jepara. Juga untuk para dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Program Master Bidang Ilmu Politik di *St Marry University*,[11)] serta Program Doktor Ilmu Pemerintahan di *London School of Economics and Political*,[12)] yang telah menghantarkan saya masuk ke dunia akademik yang saya cita-citakan. Terimakasih juga saya peruntukkan kepada para asisten yang silih-berganti telah meringankan beban kerja saya dengan kesungguhan dan ketulusan.[13)]

Selanjutnya, teman-teman di PWNU beserta para Kyai di DIY; terima kasih di beri kesempatan untuk belajar dan mengabdi. Kepada Pak Rokhmin Dahuri, *bang* Rizal Sukma, *mas* Budhi Soesetyo, serta *mas* Sukardi Rinakit, terimakasih untuk persahabatan yang indah.

Untuk Ayahanda (alm) H Soedijono dan Ibunda Zubaidah yang begitu saya cintai dan hormati, serta kedua Mertua, (alm) H Sutriman dan (almh) Hj Zuhriah, saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga atas didikan, doa dan restunya. Untuk adik-adik kandungku: *dik* Dwi, *dik* Tri, *dik* Ponco, dan *dik* Yayuk, serta adik/kakak iparku: *kak* Wik, *mbak* Nung, *mas* Salam, *dik* Salim, *dik* Fauzan, *dik* Didik, *dik* Mamik dengan keluarga masing-masing, juga terimakasih karena telah memberi saya ruang dalam keluarga besar yang harmonis.

Ucapan terimakasih yang teristimewa ingin saya persembahkan kepada keluarga. Karenanya, bersyukur sekali saya memiliki istri yang sholehah dan penuh cinta, Chudriyati, serta ketiga putri cantik, Yulida Nur Aini, Riza Maslahati, serta Nabila Fikria. Mereka berempat dengan caranya masing-masing membuat saya bangga dan bahagia. Terimakasih untuk dukungan dan doa yang dipanjatkan tanpa henti, agar Bapak bisa menjadi suami, orang tua, sekaligus ilmuwan yang baik. Kepada kalian berempat pencapaian ini Bapak dedikasikan.

Akhirnya, kepada seluruh hadirin yang dengan sabar mendengarkan pidato pengukuhan ini, terimakasih atas kebaikan hati Anda semua. Mohon maaf atas salah-khilaf kata. Dan mohon maaf juga apabila forum yang terhormat ini saya gunakan untuk *curhat*. Semoga ada manfaatnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

END NOTE

1) Memperingati hari jadi ke-47, FISIPOL UGM mengadakan seminar tentang *state of the art* ilmu-ilmu yang diajarkan. Pada tahun 2005, FISIPOL UGM menggelar acara serupa. Nada pesimistis masih tetap terdengar. Sebagian makalah yang dipresentasikan di muat dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 9, No. 2, November 2005.
2) Purwo Santoso; "*Defisiensi Teori Pemerintahan: Refleksi Atas Desentralisasi di Indonesia"*, Paper dipresentasikan dalam Seminar Internasional XI Dinamika Politik Lokal di Indonesia: *"Ada Apa Dengan 10 Tahun Otonomi Daerah*", Salatiga, 21-23 July, 2010.
3) J.H. Boeke, "*Economics and Economic Policy of Dual Soeciety"*, Tjeenk Willink & Zoon, Haalem, 1953; J.H. Boeke, *"Three Form of Disintegration in Dual Societies"*, Indonesie, Vol. 7, No.4, April 1954. Juga, J.H. Boeke, "*Western Influence on the Growth of Eastern Population"*, Economia Internationale, Vol. 7, No, 2, 1954.
4) Herbert Feith, Lance Castles (eds.), "*Indonesian Political Thinking 1945-1965*", Equinox Publishing, 2007.
5) Benedic RO'G Anderson, *"The Idea of Power in Javanese Culture"*, dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia*, First Equinox Edition, 2007.
6) Lihat Huber, George P., "*Organizational Learning: The Contributing Process and the Literature"*, Organization Science, Vol. 2, No. 1 February 1991.
7) Carlile, Paul R., *"Transferring, Translating, and Transforming: An Integrative Framework for Managing Knowledge across Boundaries"*, Organization Science, Vol. 15, No. 5 (Sep. - Oct., 2004), pp. 555-568.
8) Redefinisi peran intelektual ini, lihat J. Benda, *"Pengkhianatan Kaum Cendekiawan"*, terj. Winarsih P. Arifin, Jakarta: Gramedia,1997.
9) David Lehmann, "*Dependencia: An Ideological History"*, Institute of Development Studies at the University of Sussex, 1986.
10) Drs. Josef Riwu Kaho, Drs. Ibnu Syamsi, Drs. Suhardiman Yuwono, Drs. Mashuri Maschab, Dra. Djoeharwinarlien, Drs. Haryanto, dan Dra. Ratnawati; Mas Cornelis Lay, Mas Pratikno, Mas Bambang Purwoko, Mas Ketut Erawan, Gaffar, Ari, Mada, Linda, Wawan, Miftah, Nanang, Azizah, Sigit, Hanif, Bayu, dan Nova; Heny, Desy, Ali, Aming, Ayik.
11) Prof Dr. Henry Veltmeyer.
12) Prof Dr. James Putzel dan Prof Dr. Patrick Dunleavy.
13) Diantaranya: Ucu, Gustomy, Ayodha, Joash, Widya, dan Opan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

Box-Steffensmeier, Janet M., Henry E. Brady, David Collier. *The Oxford Handbook of Political Methodology*. Oxford University Press. 2008.

Carlile, Paul R., Transferring. *"Translating, and Transforming: An Integrative Framework for Managing Knowledge Across Boundaries"*. Organization Science, Vol. 15, No. 5 (Sep. - Oct., 2004), pp. 555-568. 2004.

Dhakidae, Daniel, 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Easton, David. *A Systems Analysis of Political Life*, Wiley. 1965.

---------. *The Political System: An Inquiry Into The State Of Political Science*, Knopf. 1971.

Fiol, C. Marlene. "Consensus, diversity and learning in Organizations", *Organization Science*, Vol. 5, No. 3 (Aug., 1994), pp. 403-420. 1994.

Huber, George P. *"Organizational Learning: The Contributing Process and the Literature"*. Orgnization Science, Vol. 2, No. 1 February 1991.

Kleden, Ignas. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES. 1987.

Latif, Yudi. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan. 2005

Mahasin, Aswab dan Nashir, Ismet (ed). *Cedekiawan dan Politik.* Jakarta: LP3ES. 2004.

McKinley, Bryan, Jones Brayboy, Angelina E. Castagno. *"How might Native science inform 'informal science learning?''. Cultural Study of Science Education*, (2008) 3:731–750. 2008

Noll, Roger G. *Challenges to Research Universities.* Brookings Institution Press. 1998.

Priyono, AE (ed). *Krisis Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PLP2M. 1984.

Rosenzweig, Robert M., Barbara Turlington. *The Research Universities and Their Patrons*. Univ. of California Press. 1982.

Santoso, Purwo, "*Managing Transformation Toward an International Research University*: Lesson-learned From Gadjah Mada University". Paper presented at UNESCO Forum on Higher Education: Research and Knowledge Colloquium on Research and Higher Education Policy, 29 Nov–1 Dec 2006, UNESCO, Fontenoy, Paris.

_____, dkk; *"Action Research: Transforming Transport Governanve Throug Collaborative Learning"*. *Working Paper 01*, Governance Reform Initiative in Transport Sector (GREAT) Project, Center for Transportation and Logistics Studies (PUSTRAL), Gadjah Mada University, 2008.

_____, *Potret Politik Ilmu-ilmu Sosial: Di Ambang Involusi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka perayaan 47 tahun Fisipol UGM, 25 September 2002.[1]

_____, "*Defisiensi Teori Pemerintahan: Refleksi Atas Desentralisasi di Indonesia"*, paper disampaikan dalam Seminar International XI: Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Ada Apa dengan 10 Tahun Otonomi Daerah ?, Salatiga, 21-23 July, 2010.

_____,dan Kacung Marijan, "*Demokratisasi Indonesia Secara Kontektual"*, Makalah Kelompok Kerja Demokratisasi, Disampaikan dalam Konvensi Kampus VII dan Temu Tahunan XIII Forum Rektor Indonesia di Universitas Sriwijaya, Palembang pada tanggal 13-15 Januari 2011.

Somantri, Gumilar Rusliwa, 2005. "*Membebaskan Ilmu Sosial dari Keterperangkapan Ganda"*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 9, No. 2, November 2005.

Verba, Sydney, *Comparative Political Systems*, Holbrook Press, 1974.

Whitehead, Jack, "*Generating Living Theory and Understanding in Action Research Studies*", Action Research, Volume 7(1): 85–99, SAGE Publications, Los Angeles. 2009.

BIODATA

Purwo Santoso, lahir di Jepara pada tanggal 4 Februari 1963. Menamatkan pendidikan di SDN 3 Sekuro Jepara; SMP Negeri 1 Jepara, dan; SMA Negeri 1 Jepara. Karena Bapaknya (alm) H Soedijono dan Ibu Zubaidah berharap dirinya menjadi pegawai pamong praja, beliau melanjutkan studinya ke Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, memperoleh gelar sarjana muda dan sarjana tahun 1987. Gelar master dalam bidang *International Development Studies* di raih dari *Saint Mary's University, Halifax, Canada* pada awal tahun 1992, dan doktor dalam Ilmu Pemerintahan dari *London School of Economics and Political Science* tahun 1999. Desertasinya berjudul: "*The Politics of Environmental Policy-making in Indonesia 1967-1994: A Study of State Capacity*" telah menggiring beliau menjadi ilmuwan sosial yang berpikir inter-disipliner.

Tidak lama setelah meraih gelar sarjana (S1), Purwo Santoso menikah dengan Dra. Chudriyati, putri (alm) H Sutriman dan (almh) Hj Zuhriah. Pernikahan pasangan ini dikarunia tiga orang putri yang cantik jelita, Yulida Nur Aini; Riza Maslahati, dan si kecil yang imut; Nabila Fikria.

Meskipun harapan orang tuanya pupus sebab beliau tidak menjadi pegawai, pilihannya untuk menekuni dunia akademik tidak mengecewakan juga. Di samping aktif mengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan (yang kemudian berganti nama menjadi Jurusan Politik dan Pemerintahan sejak tahun 2010), beliau juga pernah menjadi Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan (2003-2005); Pembantu Dekan I Fisipol UGM (2004-2008); dan Ketua Pengelola Program S-2 Pascasarjana Ilmu Politik Fisipol UGM (2009-sekarang). Dan pada tanggal 1 Juni 2010, beliau ditetapkan sebagai Guru Besar Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM berdasarkan SK Mendiknas RI.

Ketika naskah pidato ini disiapkan, beliau terpilih sebagai ketua Departemen Politik dan Pemerintahan yang mengelola program S1, S2 dan S3.

Selama berkarir, bersama jaringan komunitas ilmuwan inter-disipliner, LSM dan masyarakat umum, beliau terlibat aktif dalam upaya membangun dan memperkuat kegiatan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan publik. Selain itu, beliau juga menjadi pembicara di berbagai forum/seminar, baik tingkat nasional maupun internasional.

Publikasi yang dihasilkan cukup banyak. Beberapa diantaranya adalah: *"Advancing Learning-based Discursive Engagement: Fixing Learning Disability of Academic Community in Indonesia"* on International Conference*; Exploring Leadership dan Learning Theories in Asia*, University Sains Malaya Penang, Februari 2011*; "Horizontal Learning: Alternative to Centralized Governance"*, on International Conference; *Exploring Leadership dan Learning Theories in Asia*,University Sains Malaya Penang, Februari 2011*; "Demokrasi Indonesia Secara Kontekstual"*, dalam *"Menjadi Tuan di Negeri Sendiri, Problem dan Prospek bagi Bangsa Indonesia"*, Forum Rektor Indonesia, 2011;

"Demokrasi dan Kesejahteraan dalam Desentralisasi Asimetris", dalam *Masyarakat Terbuka dan Tantangannya di Indonesia*, Kumpulan Makalah Diskusi Pararel HUT ke-10 Yayasan TIFA, Jakarta, 8 Desember 2010; *"Power, Welfare and Democracy; What should be the major priorities in research?"*, The 6th EuroSEAS Conference was held at the University of Gothenburg from 26 to 28 August 2010; *"On the Name of Democracy; Commoditization of Religions by Political Parties in Indonesia"*, Journal of Indonesian Islam, Volume 04, Number 01, June 2010; *"Coming to Terms with Public Interests; To Link Power, Wealth and Democracy"*, International Conference on Democracy as Idea and Practice, University of Oslo, 14-15 January 2010; *"Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik"*, PolGov (Research Centre on Politics and Government), Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, 2010;

"*Cross-Cultural Learning; Securing Indonesia's Democratization and Decentralization*, International Conference on Malay Culture and Society, Organized by Universiti Brunai Darussalam, Bandar Sri Begawan, November 2009; "*Transforming Transport Governance Through Collaborative Learning*", *Governance Reform initiativE in trAnsporT sector Project (GREAT-Project)*, This research is funded through the Australia Indonesia Governance Research Partnership - an Australian Government initiative managed by the Crawford School of Economics and Government at the Australian National University, 2008; "*Proliferation Local Government in Indonesia Identity Politics Within A Trouble Nation State*, on International Convention of Asia Scholar (ICAS-5), Kuala Lumpur, 2007; "*The Map of Policy Conflict Embedded within Indonesia's Political Reform*", in The Management of Public Policy Conflicts in Southeast Asia, Published by Southeast Asian Conflict Study Network (SEACSN), Mumbay, 2007; (With Stein Kristiansen), "*Surviving Decentralisation? Impacts of Regional Autonomy on Health Service Provision in Indonesia*" Health Policy, Vol. 77, hal. 247 – 259, 2006.

Alamat Kantor **:** Program Pascasarjana Ilmu Politik Fisipol UGM, Gd. PAU UGM Lt.3 Sayap Timur Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta 55281. Telp/fax; 0274-552212/555880.

Alamat Rumah **:** Perumahan Candi Indah B-16 Jetis, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Telp; 0274-884548/+6281-227-187-45.

Email : psantoso@ugm.ac.id; psantoso.fisipol@gmail.com

UNIVERSITAS
JOGJAKARTA